BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua Negara menginginkan kemajuan serta kemakmuran, dan apabila suatu Negara ingin mencapai kemakmuran, maka mutlak Negara tersebut harus memiliki hubungan internasional dengan Negara lain, salah satunya adalah perdagangan internasional atau biasa dikenal dengan Ekspor dan Impor. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain, sedangkan impor sebaliknya. Impor merupakan transaksi yang cukup rutin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Impor sangat dipengaruhi dua faktor yakni, pajak dan kuota, sedangkan tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pada hakekatnya, setiap transaksi moneter khususnya Penyerahan BKP dan JKP yang terjadi di dalam wilayah pabean seperti halnya impor yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Luar Negeri wajib dikenakan pajak. Tentunya setiap transaksi impor yang terjadi dikenakan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang Undang Perpajakan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari

produknya, namun perlakuan tersebut tergantung dari kebijakan setiap perusahaan.

Kebijakan ekspor impor pada awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada di dalam negeri serta untuk mempererat hubungan antar negara. Kemudian berkembang menjadi alat untuk menunjukkan eksistensi negara di dunia internasional. Selain itu, kebijakan ekspor impor juga dapat menjadi media transfer kebudayaan dan teknologi.

Kini, kebijakan ekspor impor sangat penting bagi kemajuan suatu Negara, karena selain fungsi utamanya untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga berpengaruh terhadap roda perekonomian dalam negeri, salah satunya melalui pajak-pajak yang dikenakan pemerintah terhadap Barang Kena Pajak (BKP) Impor, mengingat pajak memegang kontribusi terbesar bagi pendapatan Negara. Pajak-pajak yang dikenakan oleh Pemerintah terhadap BKP Impor diantaranya adalah Bea Masuk (BM), Pajak Penghasilan 22 atas Impor (PPH 22), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor, dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM) jika BKP Impor tersebut dikategorikan sebagai barang mewah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan perpajakan tahun anggaran 2012 khususnya Pajak Perdagangan Internasional mencapai Rp49,6 triliun (www.kemenkeu.go.id)¹, yakni merupakan jumlah yang cukup besar

¹ www.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 25 Januari 2015

dalam menunjang perkembangan Indonesia khususnya dalam bidang perekonomian.

PPh 22 dan PPN atas impor memegang kontribusi yang cukup besar dalam bidang perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai impor dari setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan bernilai sangat tinggi, mengingat jumlah barang yang diimpor oleh suatu perusahaan sangatlah besar, yang menyebabkan pajak impor dari setiap perusahaan bernilai tinggi pula. Hal ini pula yang mengakibatkan beberapa perusahaan melakukan kecurangan dan penggelapan atas pajak impor, dengan cara menerbitkan faktur pajak impor fiktif, ataupun tidak mengikuti ketentuan perpajakan yang seharusnya, guna meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Seperti kasus yang terjadi pada Desember 2007 lalu, adanya penggelapan pajak impor, penggelapan pajak tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan faktur pajak impor fiktif. Akibat dari hal tersebut importer membayar pajak lebih murah dibanding yang seharusnya. (www.hukumonline.com)²

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai PPh 22 dan PPN yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk mengetahui pengenaan tarif pajak-pajak impor yang seharusnya dikenakan menurut Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan, implementasinya, serta memperbandingkan serta melihat kesesuaiannya, dan pengakuan dari nilai pajak-pajak tersebut berupa jurnal akuntansi dari

² www.hukumonline.com, diakses tanggal 24 Februari 2015

nilai pajak transaksi impor yang dilakukan oleh PT INARA. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Analisis Prosedur Penerapan dan Peengkakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai pada Barang Kena Pajak Impor di PT Indoparta Nusantara”

B. Perumusan Masalah

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Berapa pengenaan dan perhitungan PPh 22 dan PPN pada BKP Impor di PT INARA menurut ketentuan perpajakan di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 dan Undang Undang PPN dan PPNBM No. 42 Th. 2009?
2. Berapa pengenaan dan perhitungan tarif PPh 22 dan PPN pada BKP Impor di PT INARA dalam implementasinya?
3. Apakah implementasi dari PPh 22 dan PPN pada BKP Impor di PT INARA telah sesuai dengan ketentuan perpajakan di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 dan Undang Undang PPN dan PPNBM No. 42 Th. 2009?
4. Bagaimana metode pencatatan transaksi yang diterapkan di PT INARA dan bagaimana bentuk pengakuan akuntansi dari nilai PPh 22 dan PPN pada BKP Impor yang diterapkan PT INARA?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah:
 - a. Mengetahui pengenaan tarif dan perhitungan PPh 22 dan PPN pada BKP Impor di PT INARA menurut ketentuan perpajakan di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 dan Undang Undang PPN dan PPNBM No. 42 Th. 2009;
 - b. Mengetahui pengenaan tarif dan perhitungan PPh 22 dan PPN pada BKP Impor di PT INARA dalam implementasinya;
 - c. Mengetahui kesesuaian dan ketepatan antara implementasi dari pengenaan tarif dan perhitungan PPh 22 dan PPN pada BKP Impor di PT INARA dengan ketentuan perpajakan di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 dan Undang Undang PPN dan PPNBM No. 42 Th. 2009;
 - d. Mengetahui metode pencatatan akuntansi yang diterapkan di PT INARA beserta pengakuannya berupa jurnal akuntansi dari nilai PPh 22 dan PPN BKP Impor yang diterapkan PT INARA.

2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat bagi penulis, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan hasil laporan ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perpajakan;
- b. Manfaat Teortis, penulisan laporan Karya Ilmiah ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan khususnya di bidang perpajakan, sehingga hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi laporan-laporan selanjutnya;
- c. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT INARA sebagai bahan perbandingan mengenai perhitungan PPh 22 serta PPN yang dikenakan terhadap BKP Impor di PT INARA